

## MEMAHAMI PERILAKU MISKIN MASYARAKAT DESA SENGKERANG, LOMBOK TENGAH: UPAYA DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN

Siti Aminah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Mataram; [aminah.sosiolog@gmail.com](mailto:aminah.sosiolog@gmail.com)

Received: 11/07/2021; Accepted: 03/08/2021; Published: 04/03/2021

**Abstrak:** Persoalan kemiskinan sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah di Indonesia. Semakin banyak program pembangunan yang digelontorkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan justru semakin menambah deretan angka kemiskinan tersebut. Berbagai metode dan upaya yang disalurkan melalui kebijakan pemerintah dalam rangka mensuplai perekonomian masyarakat masih belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Bidikan pemerintah yang disalurkan berupa uang tunai, penambahan modal usaha, memberikan barang dan jasa, mendanai biaya pendidikan dan berbagai upaya lainnya justru membentuk masyarakat menjadi individu yang mempunyai sikap dan mentalitas miskin. Artinya dalam merespon program-program yang dirancang pemerintah, masyarakat justru hanya tertarik secara *financial* untuk memperoleh bagian dari program tersebut tanpa memahami tujuan dan *out put* yang diharapkan pemerintah. Sehingga yang terjadi adalah angka kemiskinan semakin meningkat karena masyarakat justru berlomba-lomba memperlihatkan dan mempresentasikan dirinya sebagai masyarakat miskin. Dalam konteks ini maka yang dibutuhkan bukan hanya program yang bersifat konten, akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah pembangunan pemahaman dalam rangka merubah sikap mental masyarakat untuk tidak bangga menjadi objek pembangunan tetapi dapat bertransformasi sebagai subjek yang dapat melakukan pembangunan. Oleh karena itu dalam melihat dan mengkaji persoalan tersebut penulis melakukan penelitian di Desa Sengkerang, Lombok Tengah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan perilaku miskin yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam rangka mendoktrin pemahaman lingkungan sekitar tentang kodisinya.

**Abstract:** The problem of poverty is still a concern of the government in Indonesia. However, the more development programs that are launched in the context of alleviating the poverty rate, it will only add to the series of poverty numbers. Various methods and efforts channeled through government policies in order to supply the community's economy have not shown significant results. The government's aim which is channeled in the form of cash, additional business capital, providing goods and services, funding education costs and various other efforts has actually formed people into individuals who have poor attitudes and mentality. This means that in responding to programs designed by the government, people are only interested in financially to get a part of the program without understanding the goals and outputs expected by the government. So what happens is that the poverty rate is increasing because people are actually competing to show and present themselves as poor people. In this context, what is needed is not only a program that is content, but what is more important than that is the development of understanding in order to change the mental attitude of the community not to be proud to be an object of development but to be transformed as a subject that can carry out development. Therefore, in seeing and reviewing these problems, the author conducted research in Sengkerang Village, Central Lombok. By using a descriptive qualitative approach to understand and explain the poor

*behavior shown by the community in order to indoctrinate the understanding of the surrounding environment about their condition.*

**Kata Kunci:** Kemiskinan, Perilaku Miskin, Persaingan Ekonomi

---

## 1. Pendahuluan

Dalam menjalin kehidupan sosial kemasyarakatan selalu diliputi dengan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (Laporan BPS: 2021)

Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan keselarasan antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun komitmen yang sama. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak akan pernah memperlihatkan hasil yang optimal apabila tidak diwujudkan oleh masyarakat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk membangun kesadaran tentang pentingnya bangkit dari keadaan miskin. masalah kemiskinan muncul tidak semata-mata karena banyaknya pengangguran akibat sempitnya lapangan pekerjaan, perilaku konsumtif, ataupun kurangnya keterampilan tetapi pola pikir seseorang juga sangat berpengaruh dalam permasalahan kemiskinan. Pola pikir yang menganggap bahwa kemiskinan adalah takdir yang harus diterima tanpa adanya usaha untuk mau berubah merupakan akar dari masalah yang melahirkan perilaku malas, dan pasrah pada keadaan sehingga yang terjadi adalah kemiskinan sulit diatasi. Dalam kondisi ini apapun jenis bantuan dan program yang digelontorkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam beberapa hari saja selebihnya, tentu akan kembali pada kondisi awal. Kecendrungan pemerintah dalam memberikan bantuan berupa uang tunai, biaya

pendidikan, paket sembako, modal usaha justru melahirkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena yang tidak mendapatkan bantuan juga merasa bahwa dirinya dalam kondisi miskin. sehingga merasa layak dan berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Hasilnya adalah masyarakat berlomba-lomba membangun citra diri sebagai orang miskin

Perilaku miskin adalah sikap dan mentalitas masyarakat yang memperlihatkan kondisinya sebagai orang yang kurang atau tidak mampu baik secara sosial dan ekonomi. Menurut Robert Chambers terdapat lima dimensi kemiskinan diantaranya adalah sebagai berikut: yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri yakni kondisi ketidakmampuan dalam hal pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. (2) ketergantungan, ketergantungan yang dimaksudkan disini adalah terbatasnya kemampuan individu atau kelompok dalam akses sosial dan ekonomi sehingga selalu membutuhkan pihak lain. (3) keterasingan atau kadar isolasi, secara umum keterasingan seringkali terjadi karena lokasi yang terpencil dan jauh dari mobilitas penduduk. Akan tetapi keterasingan juga dapat dilahirkan oleh sebuah pranata sosial yang dalam beberapa kondisi mengakibatkan individu atau kelompok terasingkan. Salah satunya adalah karena kondisi miskin tersebut. (4) Kerentanan dalam menghadapi situasi darurat, kondisi ini disebabkan karena masyarakat miskin tidak mempunyai persiapan atau bekal dalam menghadapi kemungkinan akan adanya kesulitan dari suatu kondisi yang tidak terduga. Bagaimana tidak persiapan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja sudah lemah, apalagi persiapan dalam menghadapi situasi demikian. (5) ketidakberdayaan (*powerless*), persoalan ini merupakan indikasi lebih lanjut dari kemiskinan. Artinya rendahnya kemampuan dalam menghasilkan pendapatan berdampak pada lemahnya kekuatan sosial seorang individu atau masyarakat sehingga menempatkan masyarakat pada posisi tidak berdaya (Chambers: 1987). Berdasarkan lima dimensi tersebut kemiskinan merupakan persoalan yang lahir dari permasalahan ekonomi yakni kelemahan individu atau kelompok dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rendahnya pendapatan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal misalnya lemahnya hasil produksi, kurangnya jaringan sosial, skill yang tidak memadai dan banyak kekurangan-kekurangan lainnya. kemiskinan merupakan permasalahan yang rumit dan harus dapat dikurangi dan diatasi. Kemiskinan bukan semata merujuk pada masalah kekurangan ekonomi tetapi mencakup lemahnya kehidupan sosial. dengan

demikian mengatasi kemiskinan bukan hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) tetapi harus menyediakan mekanisme yang tepat untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut. Sehingga diperlukan sebuah penanganan yang tepat dan membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai penentu kebijakan dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut.

Belakangan ini skema kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan transfer uang atau barang seperti bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Miskin (Raskin) Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain-lain sebenarnya bukan program yang gagal, meskipun tidak sepenuhnya mampu menanggulangi kemiskinan. Artinya banyak juga masyarakat yang terbantu dengan adanya program tersebut. Tetapi masalahnya adalah sikap masyarakat dalam merespon bantuan tersebut. Dengan mengharapkan bantuan pemerintah, maka semakin banyak masyarakat yang merasa dirinya miskin dan cenderung bertahan dalam kondisi demikian. Beberapa kelompok masyarakat justru merasa dalam posisi yang aman dalam kemiskinannya karena selalu mendapatkan bantuan untuk menopang kebutuhan hidupnya. Beberapa jenis bantuan yang disalurkan pemerintah juga cenderung dapat diakses oleh individu yang sama. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat tidak menjadikan bantuan tersebut sebagai instrumen yang dapat membuka peluang bagi dirinya untuk menciptakan tarap hidup yang lebih baik. Misalnya dengan membelanjakan kearah yang lebih produktif. Akan tetapi justru menciptakan iklim kehidupan yang dapat menjadikannya bertahan sebagai penerima bantuan tersebut. Maka melalui perilaku miskin yang dibangun individu atau kelompok bisa bertahan (*survive*) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan baru yang muncul dari fenomena diatas adalah datang dari kelompok yang tidak menerima bantuan tetapi merasa diri miskin dan layak juga mendapatkannya. Sehingga melahirkan kecemburuan sosial dan yang terjadi adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang adanya perlakuan istimewa kepada kelompok miskin. Dengan demikian masyarakat mempunyai asumsi bahwa kemiskinan bukan masalah tetapi peluang bagi dirinya untuk mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dalam kondisi demikian, maka kemiskinan akan semakin sulit untuk diatasi. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang "Perilaku Miskin Masyarakat Untuk Menghadapi Persaingan Ekonomi".

## 2. Hasil Penelitian

### a. Kemiskinan Dan Perilaku Miskin Masyarakat

#### 1) Kemiskinan

kemiskinan merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standart kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Panjaitan: 2002). Para ahli seringkali mendefinisikan kemiskinan dengan melihat kondisi ekonomi masyarakat. Dengan menjadikan pekerjaan dan pendapatan sebagai tolak ukur untuk mendapatkan data tentang kemiskinan. Pendapat ini tentu tidak dapat disalahkan, akan tetapi terlalu sederhana jika menyorot kemiskinan dengan melihat hanya dalam konteks ekonomi saja. Karena kemiskinan merupakan probabilitas dari kelompok miskin tersebut untuk meningkatkan tarap kehidupannya. Secara umum indikator kemiskinan menurut bank dunia adalah: (1) Terbatasnya kepemilikan tanah dan modal. (2) Terbatasnya akses sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan (3) Pembangunan yang dominan ke kota.(4) Kesempatan yang tidak merata dalam anggota masyarakat.(5) Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sektor ekonomi. (6) Produktifitas yang rendah. (8) Tata kelola pemerintah yang buruk. (9) dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berlebihan (Dalam Jurnal Maimun Shaleh: 2009) Masalah kemiskinan merupakan masalah yang mengglobal. Menurut Martin dan Schuman dalam (M.Annas: 2014) kemiskinan ditingkat global terjadi fenomena perbandingan antara 20:80, yaitu 20% penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia, sementara 80% sisanya hanya menguasai 20% kekayaan dunia. Akibatnya, 20% penduduk tadi akan mengendalikan penduduk lainnya yang besarnya adalah 80%. Ini artinya bahwa kekayaan dunia ini hanya dikuasai oleh 20% penduduk dunia, dan sebagian besar penduduk dunia yakni (80%) dapat digolongkan pada masyarakat yang relatif miskin.

Sedangkan di indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 15 Februari 2021 menunjukkan bahwa: Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang. Sehingga masalah kemiskinan masih menjadi masalah dalam pembangunan. Meskipun sering kali data masyarakat miskin yang dirilis oleh BPS sering kali menjadi bahan perdebatan oleh para akademisi dan politisi di Indonesia. Secara umum kemiskinan dibagi menjadi empat: yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif,

kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut merupakan ketidak berdayaan individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum mulai pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut adalah mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah 1 dolar per hari. Oleh karena itu jika sekarang ini nilai tukar dolar dengan adalah 14.475, maka semua masyarakat yang mempunyai pendapatan dibawah angka tersebut tergolong dalam masyarakat miskin absolut.

Sedangkan kemiskinan relatif terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan dengan rata-rata distribusi, artinya pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat sekitar. Mengenai kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. Dan kemiskinan kultural berkaitan dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti malas, boros, tidak kreatif sehingga melahirkan kemiskinan. Oleh karena itu sekali lagi kemiskinan bukan semata mengacu pada permasalahan ekonomi saja tetapi lebih kepada faktor yang mempengaruhinya seperti: lemahnya aspek moral, sosial dan juga aspek budaya dalam menyikapi kebijakan pembangunan.

Aspek moral, sosial dan budaya tersebut kemudian melahirkan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam realisasi kebijakan pembangunan. Kemiskinan yang muncul akibat lemahnya beberapa aspek moral, sosial dan budaya justru lebih sulit diatasi dibandingkan dengan kemiskinan yang hanya dipicu oleh faktor ekonomi semata. Masyarakat yang mempunyai moral yang tidak baik tentu akan melahirkan perilaku sosial dan kebiasaan yang tidak baik. Termasuk kebiasaan bergantung pada orang lain, atau bergantung pada kebijakan pemerintah atau mengharapkan bantuan dari pihak lain. Persoalan demikianlah yang memicu individu atau kelompok melahirkan perilaku miskin dalam masyarakat.

## 2) Perilaku Miskin Pada Masyarakat

Perilaku miskin merupakan respon masyarakat dalam menghadapi gejala pembangunan dan persaingan ekonomi. Perilaku miskin juga menjadi fenomena baru dalam kehidupan bermasyarakat. Karena manusia sebagai individu dan

warga masyarakat mempunyai kebutuhan. Sehingga selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu kebutuhan selalu berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Maka tidak heran jika dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai proses atau usaha perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera (Soetomo: 2018). Sementara dikondisi lain pesatnya pembangunan dan lajunya mobilitas masyarakat selalu melahirkan tantangan baru yang berimplikasi pada semakin ketatnya persaingan dunia kerja. Akibatnya adalah manusia dituntut untuk mempunyai skill dan kreatifitas yang bagus untuk dapat bertahan hidup. Sedangkan pada masyarakat yang mempunyai skill dan etos kerja yang rendah tentu hanya akan menjadi penonton laju pertumnuhan dan persaingan ekonomi tersebut. Oleh karena itu munculah sebuah fenomena yang penulis katakan sebagai perilaku miskin dalam masyarakat.

Dalam paradigma definisi sosial, perilaku sosial diartikan sebagai sebuah tindakan yang penuh arti dari individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya (Geprge Ritzer:2014). Jika mengamati fenomena perilaku miskin masyarakat dalam bingkai paradigma definisi sosial maka perilaku miskin ini tentu mempunyai arti dan makna bagi individu atau kelompok. Dalam teorinya Max Weber ada empat jenis perilaku sosial yaitu: (1) perilaku sosial instrumental. (2) berorientasi nilai. (3) tradisional) dan (4) Afektif. Dalam analisis perilaku sosial instrumental, perilaku miskin pada masyarakat tentu dipahami sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksudkan adalah perlindungan dan hak yang didapatkan sebagai masyarakat miskin. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini artinya bahwa disamping terdapat berbagai macam ketimpangan bahkan samapai kepada ketidakadilan dan diskriminasi pada masyarakat miskin. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dengan menyandang predikat sebagai masyarakat miskin juga mempunyai hak dan keistimewaan dalam mengakses pelayanan sosial dalam pembangunan. Misalnya di bidang pendidikan keistimewaan bagi masyarakat miskin adalah mendapat jaminan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada bidang kesehatan masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. mendapatkan bantuan berupa rumah layak huni dan banyak lagi yang lainnya. beberapa keistimewaan inilah yang menjadikan beberapa

masyarakat merasa nyaman dalam posisi miskin. sehingga menjadi miskin adalah suatu hal yang sangat menarik bagi masyarakat tertentu.

Menurut Homans perilaku sosial merupakan pertukaran aktifitas, ternilai ataupun tidak atau kurang lebih menguntungkan atau mahal bagi dua orang yang berinteraksi. Dalam artian bahwa teori pertukaran ini berusaha menjelaskan bahwa perilaku sosial berdasarkan pada imbalan dan biaya (Ritzer: 2012). Dengan demikian perilaku miskin masyarakat merupakan upaya individu atau kelompok untuk mempertukarkan atau menawarkan diri sebagai masyarakat yang tergolong dalam kelompok yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin. imbalannya adalah dapat mengakses semua hak yang dapat diperoleh sebagai orang miskin.

b. Faktor Penyebab Munculnya Perilaku Miskin Pada Masyarakat

1) Struktural

Dalam menyalurkan bantuan, pemerintah memerlukan penjabaran yang jelas dalam mengkategorikan masyarakat miskin. Pendekatan dalam menentukan kriteria dan indikator kemiskinan juga sangat berpotensi melahirkan perilaku miskin dalam masyarakat. Indikator dalam mengukur kemiskinan yang keliru dapat berimplikasi pada sasaran pembangunan yang tidak tepat. Alhasil perilaku miskin akan muncul sebagai reaksi untuk dapat dilihat sebagai salah satu yang dapat tergolong dalam indikator kemiskinan tersebut. Dengan tujuan untuk memperoleh hak sebagai masyarakat miskin. Indikator yang digunakan selama ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika dipetakan, pendekatan berbasis hak pada dasarnya meliputi tiga tahap dalam pengukurannya (Bentley Dalam Edi Suharto:2013). Pada setiap tahap memiliki implikasi bagi perumusan desain sistem pengukuran kemiskinan:

- a) Analisis status atau kondisi kehidupan orang miskin yang diukur melalui kajian ilmiah mengenai seperangkat standart-standart minimum atau yang berkaitan dengan model sebab akibat yang telah terbukti atau opini responden yang bersangkutan. Artinya dalam mengukur status atau kondisi kehidupan manusia berdasarkan pada kerangka yang berbasis hak memerlukan pengukuran fenomena yang kongkrit dan dapat diobservasi untuk mengidentifikasi apakah standart minimum dapat dipenuhi.
- b) Identifikasi pemangku kewajiban: apa yang harus dipenuhi negara dan pemangku kewajiban lainnya. Hakekat kewajiban negara terhadap warganya perlu dijelaskan.

- c) Sfesifikasi hak-hak orang miskin dan penyediaan pelayanan untuk memenuhi hak tersebut.

Berdasarkan pada tiga tahap diatas, dalam menentukan indikasi miskin memerlukan sebuah observasi yang mendalam. Tidak berhenti sampai pada hasil observasi tersebut tetapi memerlukan sebuah identifikasi yang tepat. Sehingga dapat menghasilkan sfesifikasi yang tepat mengenai indikator dan hak-hak masyarakat miskin.

## 2) Kultural

Perilaku miskin juga berkembang sebagai fenomena budaya dalam masyarakat sekitar. Kebudayaan atau kebiasaan turun temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya dan dijadikan sebagai pegangan dan kebiasaan hidup masyarakat. Termasuk budaya miskin, Budaya kemiskinan mencakup apa yang diyakini (nilai-nilai), respons dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan) yang berlangsung terus-menerus. Lewis mengidentifikasi budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis. Perilaku yang mencirikan budaya kemiskinan ini dijalankan secara turun-temurun antar generasi, sehingga menghambat suatu kelompok dalam masyarakat tertentu untuk keluar dari garis kemiskinan (Lewis dalam Jurnal Johan Arifin:2020). Misalnya kalau di desa adalah kebiasaan menunggu musim hujan untuk mendapatkan upah sebagai buruh tani tanpa adanya usaha untuk mencoba pekerjaan baru, budaya yang menyatakan bahwa lebih baik hidup sederhana yang penting bisa kumpul bersama keluarga. Contoh diatas disadari atau tidak sebenarnya menjadi akar masalah dari sulitnya pengentasan kemiskinan.

## 3) Sosial

Umumnya setiap masyarakat menginginkan kondisi kehidupannya berkembang semakin baik. Suatu kehidupan dimana kebutuhan-kebutuhan dapat semakin terpenuhi. Sehingga ada rasa aman karena tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran tentang hari esok. Setiap masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang memberikan iklim kondusif guna aktualisasi diri dan mempunyai relasi sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian dalam kehidupan

bermasyarakat di desa khususnya apabila kehidupan saat sekarang ini masih belum memenuhi kondisi ideal, maka selalu ada dorongan positif dari lingkungannya untuk bisa merubah hidup menjadi lebih baik. Misalnya dengan memberikan keringanan dalam setiap urunan bagi masyarakat miskin. Tentu hal yang seperti ini adalah langkah yang positif dalam rangka membantu sesama. Akan tetapi tidak sedikit juga toleransi semacam ini seringkali melahirkan kecemburuan sosial pada masyarakat yang tidak mendapatkannya. Sehingga perilaku miskin lahir untuk menarik empati dari lingkungan sekitar.

### C. Konsep Pembangunan Sikap Dan Mental Masyarakat

Perilaku masyarakat biasanya muncul dari pengaruh yang dihasilkan oleh lingkungan. Dalam arti bahwa perilaku sosial masyarakat dapat dibentuk oleh lingkungan sosialnya sendiri, hukum atau norma yang mengatur relasi sosialnya, baik itu hukum pemerintah ataupun hukum adat atau budaya setempat. Dalam paradigma fakta sosial yang lahir dan besar dari karya Emile Durkheim menyatakan bahwa sikap dan perilaku individu dibentuk oleh norma sosial atau hukum adat dan hukum pemerintah yang dalam hal ini disebut sebagai fakta sosial dalam bentuk Material. Kemudian paradigma ini melahirkan dua teori besar yang disebut dengan teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Jika kita mengamati fenomena kemiskinan dalam konsep teori konflik sosial maka sebenarnya masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsurnya. Artinya kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah. Sehingga masyarakat miskin cenderung dianggap sebagai pihak yang dikuasai dan dapat dimanfaatkan kelemahannya. Sedangkan dalam pandangan strukturalisme fungsional, sebenarnya masyarakat itu selalu dalam posisi yang *equilibrium* atau seimbang. Karena seluruh struktur sosial dan sistem sosial fungsional terhadap yang lain (Ritzer: 2014). Sehingga dalam kondisi ini masyarakat miskin itu memberikan fungsi bagi masyarakat yang lain atau terhadap sistem yang berjalan dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga kemiskinan itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam menjalankan roda kehidupan. Oleh karena itu jika kita mengamati dalam konteks kehidupan masyarakat desa, pemilik tanah merasa sangat terbantu dengan adanya masyarakat miskin karena dapat memanfaatkan tenaganya dengan harga yang murah untuk membantu merawat tanamannya. Dalam kondisi ini masyarakat miskin cenderung bertahan dan merasa ketergantungan dengan pekerjaan yang ada. Merasa enggan

mencoba usaha lain yang lebih menjanjikan bahkan pada saat sedang tidak ada peluang kerja. maka untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik adalah harus dilakukan dengan merubah sikap dan mental masyarakat.

Pembangunan sikap dan mental yang dimaksudkan di sini adalah menanamkan budaya berfikir yang berorientasi terhadap masa depan. Masyarakat diberikan pemahaman tentang keharusan mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Selanjutnya membangun hasrat masyarakat untuk mau berinovasi dan bereksplorasi dalam dunia kerja. Sehingga tidak tergantung pada satu sumber pendapatan saja. Serta menanamkan rasa percaya diri bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk dapat menghasilkan karya yang lebih baik dan berharga. Merubah pandangan masyarakat untuk tidak tergantung pada satu sumber penghasilan. Serta tidak menjadikan bantuan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang selalu diharapkan. Dalam kehidupan masyarakat desa yang cenderung homogen dalam bidang pekerjaan juga seringkali merasa sulit beradaptasi dengan pekerjaan baru. Misalnya masyarakat desa yang identik dengan pekerjaan sebagai petani atau buruh tani merasa sangat sulit menyesuaikan diri dengan bidang usaha yang lain misalnya berwirausaha. Sehingga tidak jarang program pemerintah yang memberikan modal usaha tidak sejalan dengan yang diharapkan. Oleh karena itu sebelum melakukan pembangunan fisik dengan membangun usaha rakyat, sangat penting adanya pendampingan masyarakat untuk mengubah pola pikir yang demikian.

### 3. Kesimpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang melekat pada masyarakat. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga pemerintah selalu berupaya melakukan terobosan-terobosan yang diimplementasikan dalam berbagai program dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi permasalahan kemiskinan bukan sesederhana yang dibayangkan. Permasalahan kemiskinan tidak semata-mata tentang kelemahan di bidang ekonomi melainkan merupakan permasalahan yang kompleks dan menyangkut aspek lain seperti, lemahnya moral, kurangnya skill untuk berinovasi dan mengeksplorasi hal baru, serta pandangan dan rasa ketergantungan pada pihak lain. Sehingga melahirkan budaya baru dalam

masyarakat yang penulis sebut sebagai perilaku miskin. perilaku miskin muncul sebagai upaya untuk mempertukarkan keadaannya dengan imbalan berupa bantuan pemerintah, empati masyarakat serta dalam mengakses kemudahan-kemudahan lainnya.

Beberapa faktor yang melahirkan perilaku miskin diantaranya adalah (1) struktural atau kebijakan pemerintah dalam menentukan indikator miskin serta program bantuan yang disalurkan secara tunai mengakibatkan masyarakat menjadi tergantung dan selalu berharap untuk mendapatkannya. (2) kultural, budaya masyarakat yang merasa nyaman dengan kondisi miskin juga menjadi salah satu faktor yang melahirkan perilaku miskin. (3) sosial, relasi sosial juga sering kali memberikan toleransi dan keringanan terhadap masyarakat yang dipandang miskin.

Sehingga dalam upaya mengurangi atau mengentas angka kemiskinan. Pemerintah bukan hanya merujuk pada pembangunan yang bersifat fisik tetapi juga harus mempertimbangkan pembangunan sikap dan mentalitas bagi masyarakat. Karena dengan mengubah pemahaman serta sikap dan mentalitas pada masyarakat maka akan melahirkan semangat baru, cara pandang yang baru dan mental yang baru di tengah kehidupan.

## Referensi

- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- M. Annas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta
- Panjaitan, Merphin. 2002. *Memberdayakan Kaum Miskin*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi (Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- 2014. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta

## Jurnal

Lewis Dalam Jurnal Johan Arifin. 2020. Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia Culture Of Poverty In Poverty Reduction In Indonesia. Artikel Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI.

Sholeh, Maimun, 2009, "Kemiskinan: Telaah Dan Beberapa Strategi Penanggulangannya, Artikel Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ekonomi", Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

## Lain-Lain

BPS: Profil Kemiskinan Di Indonesia. September 2020 yang dirilis 15 februari 2021.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).